

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alasyah, Wana, 2020, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2020*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Anandya, Diki *et. al*, 2021, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Comission, United States Sentencing, 2021, *Guidelines Manual*, United States.
- Council, Sentencing, 2014, *Fraud, Bribery and Money Laundering Offences Definitive Guideline*, United Kingdom.
- Fajar dan Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hartaningsih, Maria, 2011, *Korupsi yang Memiskinkan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Hatta, Moh., 2010, *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- HS, Salim dan Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persadam Jakarta.

ICW, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, 2022, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester 1 Tahun 2022*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Jurdi, Fajlurrahman, 2017, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta.

Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta.

Koeswadi, Harmien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

KPK RI, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK RI, Jakarta.

Langkun, Tama S. *et.al.*, 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

MaPPI FH UI *et al.*, 2021, *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, MaPPI FHUI, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

_____, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Moeljatno, 1999, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.

Nuraeny, Henny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Padfield, Nicola, 2013, *Exploring The Success of Sentencing Guidelines*, Oxford University Press, Oxford.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Cetakan I*, Nusa Media, Bandung.

Putra, Risqi Perdana, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Depublish, Yogyakarta.

Sarosa, Samiaji, 2012, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Indeks, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto dan Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

_____, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syamsudin, M., 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifudin, H. M., 2021, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*, Kencana, Jakarta.

Tim Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Z., Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1267)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387).

C. Jurnal, Hasil Penelitian, Tesis, Skripsi

Akbari, Anugerah Rizki *et.al*, 2017, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Hasil Penelitian, MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Freiberg, Arie dan Krasnostein, Sarah, "Pursuing Consistency in An Individualistic Sentencing Framework; If you Know Where Yo're Going, How Do You Know When You've Got There?", *Law and Contemporary Problems*, No. 76, 2013.

Hambali, Azwad Rachmat *et. al.*, "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2, September 2021.

Josua, Joey dan Amalia, Syarifah, "Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara", *Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2021.

Marbun, Andreas N., 2020, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*, Hasil Penelitian, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta.

Melani, "Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2014.

Muharram, Ade Kurniawan dan Gulo, Nimerodi, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, No. 3, Juli 2018.

Prahassacitta, Vidya, "Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, September 2018.

Rahmayanti, Putri, 2021, "Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT MDN)", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Medan.

Salistina, Dewi, “Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden Curriculum dan Pendidikan Moral”, *Jurnal Ta'allum*, Vol. 03, No. 02, November 2015.

Suhariyanto, Budi, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No.1, Juni 2018.

Suyatno, Hendrikus, 2019, “Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020”, *Tesis*, Program Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Taufik, Ade Irawan, “Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2, Vol. 14, Mei 2014.

D. Makalah/Pidato

Anggono, Bayu Dwi, “Gagasan Seputar Evaluasi Peraturan Perundang-undangan”, *Makalah*, Continuing Legal Education tentang Ex-Post terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 24 Juni 2015.

Soetipto, Adi Andojo, “Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence)”, *Musyawarah*, Lokakarya Masalah Pemidanaan: Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 1984.

E. Internet

Admin MaPPI, “Sosialisasi Publik Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, <https://mappifhui.org/sosialisasi-publik-perma-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor>, diakses 6 September 2022.

ASH, “Dua Ahli Hukum Ini Bongkar Kelemahan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-ahli-hukum-ini-bongkar-kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor-lt57330adb02c1b?page=1>, diakses 4 September 2022.

CNN Indonesia, “Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 1800 negara”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510->

12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180, diakses 16 Agustus 2022.

Commission, United States Sentencing, “About The U.S. Sentencing Commission”, <https://www.ussc.gov/about-page>, diakses 5 Januari 2023.

Council, Sentencing, “About the Sentencing Council”, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/sentencing-and-the-council/about-the-sentencing-council/>, diakses 5 Januari 2023.

CR-27, “Korupsi Korporasi dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidananya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-korporasi-lt61dcc1ac7d662>, diakses 21 November 2022.

Dani, M., “Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b>, diakses 1 September 2022.

FHUI, MaPPI, “Sekilas MaPPI FH UI”, <https://mappifhui.org/>, diakses 5 Januari 2023.

Hiariej, Eddy O. S., “Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi”. [Mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com).
<https://mediaindonesia.com/opini/254394/percobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi#:~:text=Dalam%20doktrin%20hukum%20pidana%2C%20percobaan,merupakan%20perluasan%20dapat%20dipidananya%20pelaku>, diakses 16 Agustus 2022.

Kamil, Irfan, “PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati Divonis Denda Rp900 Juta Terkait Korupsi Dermaga Subang”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/16324381/pt-nindya-karya-dan-pt-tuah-sejati-divonis-denda-rp-900-juta-terkait-korupsi#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Majelis,b ersalah%20melakukan%20tindak%20pidana%20korupsi>, diakses 7 Januari 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Mahkamah Agung Intens Berupaya Dalam Menyusun Pedoman Pemidanaan”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4626/melalui-Peraturan-Mahkamah-Agung-nomor-1-tahun-2020-mahkamah-agung-intens-berupaya-dalam-menyusun-pedoman-pemidanaan>, diakses 2 September 2022.

Nov dan Ash, “Disparitas Sanksi Pidana Korporasi di Berbagai UU”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-sanksi-pidana-korporasi-di-berbagai-uu-lt58875313748b9/>, diakses 7 Januari 2023.

Nursobah, Asep, Impelemntasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung, [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar#:~:text=Mahkamah%20Agung%20menetapkan%205%20\(lima,peradilan%20di%20bawah%20Mahkamah%20Agung,](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar#:~:text=Mahkamah%20Agung%20menetapkan%205%20(lima,peradilan%20di%20bawah%20Mahkamah%20Agung,) diakses 6 September 2022.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Pedoman Ketua Mahkamah Agung dalam Acara Sidang Istimewa Mahkamah Agung dengan Agenda Tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020”, <https://www.pta-semarang.go.id/berita-kegiatan/210-pidato-ketua-mahkamah-agung-dalam-acara-sidang-istimewa-mahkamah-agung-dengan-agenda-tunggal-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2020>, diakses 6 September 2022.

PSHK, “Urgensi Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan”, www.parlemen.net, diakses 28 Desember 2022.

Rasamala Aritonang, “Pedoman Pemidanaan: Kepastian atau Keadilan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pedoman-pemidanaan-kepastian-atau-keadilan-lt5f471f5737d9b/?page=2>, diakses 4 September 2022.

Tempo.co. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 negara”. <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara>, diakses 20 Oktober 2022.

Yuntho, Emerson, “Kala Korporasi Terjerat Korupsi”, <https://antikorupsi.org/id/article/kala-korporasi-terjerat-korupsi>, diakses 7 Januari 2023.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2688 K/Pid.Sus/2009 perihal Kasasi Tindak Pidana Korupsi, 14 Desember 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 K/Pid.Sus/2010 perihal Kasasi Tindak Pidana Korupsi, 15 Juni 2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 L/Pid.Sus/2010 perihal Kasasi Tindak Pidana Korupsi, 5 Oktober 2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 K/Pid.Sus/2012 perihal Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi, 11 April 2012.